AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 4, No. 1, Januari 2024

Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023

Endang Purwanti
Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
endangpurwanti89@gmail.com

Submitted: 03rd Aug 2023 | **Edited**: 11th Dec 2023 | **Issued**: 01st Jan 2024

Cited on: Purwanti, E. (2024). Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *4*(1), 1-10.

ABSTRACT

Poverty remains a serious issue haunting Indonesia, affecting the lives of millions of its inhabitants. To comprehend the dynamics of poverty, a thorough analysis of Indonesia's poverty profile from 2019 to 2023 is necessary. This is crucial for laying the foundation for the formulation of more effective policies to address the challenges of poverty in the future. The research aims to provide a comprehensive overview of Indonesia's poverty profile during the specified period, utilizing a descriptive analysis approach with secondary data from various official sources, including the Central Statistics Agency (BPS). Data analysis employs descriptive statistical methods to depict the distribution of poverty in Indonesia from 2019 to 2023. The findings indicate that during this period, both the total number and percentage of the population living in poverty experienced a decline. Nevertheless, poverty remains more concentrated in rural areas. The impoverished population tends to be dominated by individuals with low educational attainment, younger age groups, and those engaged in informal employment.

Keywords: Poverty, Urban, Rural, Indonesia

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah tantangan serius yang telah menjadi fokus perhatian dunia selama bertahun-tahun. Menurut definisi Bank Dunia, kemiskinan bukan sekadar kekurangan finansial, melainkan kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Hermawati, 2017). Keberadaan kemiskinan menciptakan lingkungan di mana hak-hak fundamental, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, menjadi sulit diakses oleh sebagian besar penduduk (Almizi & Hermawati, 2018). Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan untuk memperoleh pendapatan yang mencukupi, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam memanfaatkan peluang-peluang pembangunan yang seharusnya menjadi hak setiap individu (Rahman, et al., 2019).

Bank Dunia menekankan bahwa pemahaman tentang kemiskinan harus mencakup dimensi multidimensional, memperhitungkan sejumlah faktor yang berkontribusi pada ketidaksetaraan dan keterpinggiran. Terlepas dari pertumbuhan ekonomi suatu negara, ketidaksetaraan yang ekstrem dapat menciptakan jurang yang memisahkan kelompok masyarakat tertentu dari akses terhadap sumber daya dan peluang (Sianturi, et al., 2021). Oleh karena itu, penanganan kemiskinan tidak hanya memerlukan pendekatan finansial semata, tetapi juga melibatkan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural dan sistemik yang dapat memperkuat siklus kemiskinan (Rachmawati, 2020).

Secara global, upaya untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu negara, melainkan sebuah komitmen bersama dari komunitas internasional. Kerjasama lintas batas dan implementasi kebijakan yang holistik diperlukan untuk menghadapi akar permasalahan kemiskinan. Ini melibatkan penciptaan peluang ekonomi inklusif, penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial yang memadai (Aprianto, 2018). Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, masyarakat internasional dapat bersama-sama menciptakan perubahan positif dalam perjuangan global melawan kemiskinan (Prasodjo, 2017).

Di Indonesia, kemiskinan telah menjadi masalah yang telah lama dihadapi oleh masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun dari 26,36 juta orang pada Maret 2022. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 9,36 persen.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang serius dan kompleks. Kemiskinan di Indonesia masih merupakan masalah yang harus segera diatasi.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu, keluarga, atau kelompok masyarakat tidak memiliki cukup sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan (Saragih, et al., 2022). Kemiskinan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik di negara maju maupun berkembang. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan meliputi (Fadillah, 2021):

1. Pendapatan Rendah. Orang-orang dengan pendapatan yang rendah memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Pendidikan Rendah. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dapat mengurangi peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan mengakibatkan kemiskinan generasional.
3. Ketidaksetaraan. Sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil dapat menyebabkan kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah kemiskinan.
4. Kesehatan Buruk. Biaya perawatan kesehatan yang tinggi atau kurangnya akses ke layanan kesehatan dapat menyebabkan masalah kesehatan menjadi pemicu kemiskinan.
5. Ketidakstabilan Ekonomi. Krisis ekonomi, pengangguran, atau fluktuasi harga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan.
6. Kurangnya Akses ke Sumber Daya Produktif. Beberapa kelompok masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya produktif seperti tanah, modal, atau pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Upaya untuk mengatasi kemiskinan melibatkan berbagai pendekatan, termasuk kebijakan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi (Maulidina, et al., 2022). Organisasi internasional, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat seringkali bekerja sama untuk merancang program-program yang bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sihombing & Muslianti, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019-2023. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan mengumpulkan data-data yang telah tersedia. Data yang diperoleh dari Susenas dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tabel dan grafik. Analisis deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau fenomena yang sedang terjadi.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun dari 26,36 juta orang pada Maret 2022. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan, dari 9,54% pada Maret 2022 menjadi 9,36% pada Maret 2023.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih merupakan masalah yang serius. Namun, terdapat tren penurunan kemiskinan yang positif. Berikut adalah beberapa gambaran umum kemiskinan di Indonesia saat ini:

1. Kemiskinan di Indonesia masih terkonsentrasi di daerah perdesaan. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 13,17%, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 6,49%.
2. Kelompok penduduk miskin di Indonesia masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah, berumur muda, dan bekerja di sektor pertanian. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 46,32%, sedangkan yang berpendidikan SLTA ke atas sebesar 16,28%. Persentase penduduk miskin yang berumur 15-24 tahun sebesar 20,04%, sedangkan yang berumur 65 tahun ke atas sebesar 10,52%. Persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian sebesar 46,06%, sedangkan yang bekerja di sektor industri sebesar 19,57% dan sektor jasa sebesar 24,37%.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, seperti program bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan program pembangunan infrastruktur. Namun, upaya-upaya tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia (Purnomo, et al., 2021). Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses terhadap

pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta melalui pembangunan infrastruktur yang merata (Wibowo, 2018).

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Beberapa inisiatif ini mencakup program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan:

1. Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial yang menyasar keluarga miskin dan rentan. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga penerima untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). PNPM merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan infrastruktur lokal.
3. Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP adalah program bantuan pendidikan yang memberikan kartu kepada siswa miskin untuk digunakan dalam mendukung kebutuhan pendidikan mereka, seperti membeli perlengkapan sekolah dan membayar biaya sekolah.
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program BLT sebagai respons terhadap dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Program ini memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin yang terdampak secara ekonomi.
5. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi. Pemerintah juga fokus pada pengembangan infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang pekerjaan dan memperkuat perekonomian lokal.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PKD). PKD adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setempat.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi faktor demografi, seperti pendidikan, usia, dan jenis kelamin (Safitri, et al., 2022). Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan (Setiawan & Jamaliah, 2023). Berdasarkan data dan informasi BPS, faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor struktural dan faktor kultural.

1. Faktor struktural

   Faktor struktural merupakan faktor-faktor yang berasal dari sistem perekonomian dan sosial masyarakat. Faktor struktural yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia antara lain:

   a. Ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu faktor yang paling dominan menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan yang tinggi menyebabkan sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan yang rendah, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
   b. Struktur ekonomi yang tidak merata. Struktur ekonomi yang tidak merata menyebabkan sebagian besar masyarakat hanya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, yang memiliki produktivitas yang rendah. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan yang rendah.
   c. Terbatasnya lapangan kerja. Terbatasnya lapangan kerja menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak memiliki sumber pendapatan.

2. Faktor kultural

   Faktor kultural merupakan faktor-faktor yang berasal dari budaya masyarakat. Faktor kultural yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia antara lain:

   a. Rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan yang rendah.

b. Tingginya angka putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan yang rendah.
c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan menyebabkan masyarakat tidak memiliki motivasi untuk bekerja keras dan meningkatkan pendapatan mereka.

Perkembangan Garis Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran per kapita per bulan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makan. Garis kemiskinan digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemiskinan (Fatony, 2017). Berikut adalah perkembangan garis kemiskinan menurut wilayah, September 2020 – Maret 2023:

Tabel 1. Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Wilayah

Wilayah	September 2020	Maret 2021	September 2022	Maret 2023
Indonesia	Rp421.968	Rp442.250	Rp450.465	Rp453.668
Pulau Jawa	Rp446.836	Rp470.097	Rp480.785	Rp484.227
Luar Pulau Jawa	Rp398.208	Rp415.146	Rp421.648	Rp424.616

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa garis kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan secara umum dalam periode September 2020 – Maret 2023. Kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kenaikan harga pangan. Kenaikan harga pangan merupakan salah satu faktor yang paling dominan menyebabkan kenaikan garis kemiskinan. Kenaikan harga pangan menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.
2. Kenaikan harga barang dan jasa non-makan. Kenaikan harga barang dan jasa non-makan juga turut berkontribusi terhadap kenaikan garis kemiskinan. Kenaikan harga barang dan jasa non-makan menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan non-makan mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
3. Peningkatan biaya hidup. Peningkatan biaya hidup secara umum juga turut berkontribusi terhadap kenaikan garis kemiskinan. Peningkatan biaya hidup ini

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti inflasi, kenaikan harga bahan bakar minyak, dan kenaikan tarif listrik.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi dalam periode September 2019-Maret 2023.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Periode	Jumlah (Juta)	Persentase (%)
September 2019	24,79	9,22
Maret 2020	25,03	9,32
September 2020	26,42	10,19
Maret 2021	25,69	9,71
September 2021	26,36	9,54
Maret 2022	26,36	9,54
September 2022	26,36	9,57
Maret 2023	25,90	9,36

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 26,42 juta orang pada September 2020 menjadi 25,90 juta orang pada Maret 2023. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 10,19% pada September 2020 menjadi 9,36% pada Maret 2023. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan telah membuahkan hasil. Namun, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia:

1. Pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang positif menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat miskin memiliki pendapatan yang lebih tinggi.
2. Peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat miskin, sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan memiliki pendapatan yang lebih tinggi.
3. Program bantuan sosial. Program bantuan sosial dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

4. Program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dalam periode September 2019-Maret 2023.

Tabel 3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Periode	P1	P2
September 2019	1,92	0,47
Maret 2020	1,94	0,48
September 2020	2,04	0,51
Maret 2021	1,96	0,49
September 2021	1,94	0,48
Maret 2022	1,94	0,48
September 2022	1,94	0,48
Maret 2023	1,93	0,47

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dari 1,92 pada September 2019 menjadi 1,93 pada Maret 2023. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,47 pada September 2019 menjadi 0,47 pada Maret 2023. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2019-2023, terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia. Meskipun demikian, kemiskinan masih terkonsentrasi di daerah perdesaan, menunjukkan adanya ketidaksetaraan antarwilayah. Kelompok penduduk miskin masih didominasi oleh individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah, usia muda, dan bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, dan diversifikasi ekonomi di wilayah perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Almizi, M., & Hermawati, I. (2018). Upaya Pengentasan Kemiskinan dengan Mengurangi Konsumsi Rokok di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *17*(3), 239-256.

Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan dalam perspektif ekonomi politik Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, *8*(2).

Fadillah, A. (2021). Makro Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Makroekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, *1*(2), 186-203.

Fatony, A. (2017). Kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis participatory poverty assessment: Kasus Yogyakarta. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, *16*(2), 123-142.

Hermawati, I. (2017). Pengukuran konstrak kemiskinan di Indonesia. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *41*(3), 269-284.

Maulidina, S., Zahara, V. M., & Sutjipto, H. (2022, October). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Pada Sektor Pertanian di Indonesia Bagian Barat. In *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* (Vol. 2, No. 1, pp. 257-269).

Prasodjo, I. (2017). Perkembangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial regional di Indonesia 2011-2015. *Jurnal Ekonomi*, *22*(1), 22-36.

Purnomo, S. D., Wijaya, M., & Setiawan, H. (2021). Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Imiah Manajemen dan Bisnis*, *18*(1), 10-19.

Rachmawati, M. (2020). Kontribusi sektor umkm pada upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal ekonomi, sosial & humaniora*, *1*(07), 1-13.

Rahman, P. A., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Kemiskinan dalam perspektif ilmu sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *3*(3), 1542-1548.

Safitri, S. E., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(4), 259-274.

Saragih, R. F., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, *1*(2), 71-79.

Setiawan, I., & Jamaliah, J. (2023). Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia. *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik*, *2*(5), 399-405.

Sianturi, V. G., Syafii, M., & Tanjung, A. A. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, *5*(2), 125-133.

Sihombing, P. R., & Muslianti, D. (2022). Apakah Dana Desa dan Fungsi Belanja APBD Mampu Mengatasi Kemiskinan di Indonesia?. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, *2*(2), 236-243.

Wibowo, T. (2018). Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tinjauan Analisis Regional). *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, *16*(2), 24-54.